

6 hal

6 Juni 08



6/6.01.09

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 521/Menkes/SK/VI/2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
BIDANG KESEHATAN TANAH PAPUA (P2KTP)**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat perlu dilakukan berbagai peningkatan upaya kesehatan terutama yang menyangkut pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, kusta, infeksi saluran pernapasan akut/ISPA, dan penyakit tidak menular lainnya seperti kesehatan ibu, anak, reproduksi, gizi masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama di wilayah pedalaman, terpencil, perbatasan dan kepulauan;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu memberikan dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Bidang Kesehatan Tanah Papua (P2KTP) yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN TANAH PAPUA (P2KTP).**

Kesatu : Membentuk Tim Percepatan Pembangunan bidang Kesehatan Tanah Papua (P2KTP).

Kedua : Susunan organisasi dan personalia Tim P2KTP sebagai berikut :

PELINDUNG

DR. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K),

Menteri Kesehatan

PENGARAH

Dr. Sjafii Ahmad, MPH.

DR. Faiq Bahfen, SH.

Dr. Budihardja, MPH, DTMH.

Dr. Farid Wajdi Husain, Sp.B(K).

Dra. Kustantinah Apt, M.A.pp.Sc.

Dr. I Nyoman Kandun, MPH.

Dr. Triono Soendoro, PhD.

Dr. Bambang Giatno, MPH.

Dr. Krisnajaya, MS

Dr. IndriyonoTantoro, MPH

Agus Sunarya , S.Kom.

Sekretaris Jenderal

Inspektur Jenderal

Direktur Jenderal Bina Kesmas

Direktur Jenderal Bina Yanmedik

Direktur Jenderal Bina Yanfar &

Alkes

Direktur Jenderal P2PL

Kepala Badan Litbangkes

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Staf Ahli Menteri Bidang

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan & Desentralisasi

Staf Ahli Menteri Bidang

Perlindungan Faktor Risiko

Staf Khusus Menteri Bidang

Percepatan Pembangunan di

Daerah Terpencil, Kepulauan dan

Perbatasan

PELAKSANA

Koordinator : Dr. Ahmad Nizar S. Syihab, Sp.An

Staf Khusus Menteri Bidang

Politik Kebijakan Kesehatan

Ketua : Dr. Bambang Sardjono, MPH

Direktur Bina Kesehatan

Komunitas

Wakil Ketua : Dr. Madiono, MPH

Kepala Biro Perencanaan dan

Anggaran

Sekretaris I : Dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS

Kabag PI Ditjen Bina

Kesmas

Sekretaris II : Drs. Bayu Teja, Apt, M.Pharm

Kabag Penyusunan

Anggaran, Biro Perencanaan

& Anggaran



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

TIM SEKRETARIAT

Sekretariat : Drg. Hermanto Setia Hadi, MS
Drg. Kartini Rustandi, MKes.
Dra. Gusmiati, MM
Ir. Moh. Nasir, MKM
Dr. Jehezkiel Panjaitan
Dr. Linda S. Rohaeti
Dr. Fatonah
Dr. Bambang Setia Sutrisna
Dr. Imran Pambudi,
Dahlan Choeron
Budiman Sitepu, SKM, Mkes.
Amin Subagio
Kusnawi
Sodik
Dr. Linda S. Rohaeti
Dr. Fatonah
Dikam
Kasubdit Bina Upaya Kes
Perkotaan dan OR
Kasubdit Bina Upaya Kes DTPK
Kasubag TU Dit Bina Keskum
Staf Dir Bina Kes Anak
Staf Dit Bina Keskum
Staf Subdit Bina Upaya Kes DTPK
Staf Bina Upaya Kes Perkotaan
dan OR
Staf Setditjen Kesmas
Staf Dir Bina Kes Ibu
Staf Setditjen Bina Kesmas
Staf DTPK Dit Bina Keskum
Staf TU Seditjen Bina Kesmas
Staf Dit Bina Keskum
Staf Setditjen Bina Kesmas
Staf DTPK Dit Bina Keskum
Staf Subdit Perkotaan & OR
Staf Subdit Perkotaan & OR

BIDANG-BIDANG

I. Bidang Penguatan Sistem Kesehatan

Ketua : Dr. Edi Suranto, MPH
Sekretaris : Ir. Kresnawan, M.Sc
Anggota : Dr. Ratna Dewi Umar, Mkes
Dr. Mulya Hasymi, SpB
Dr. Rustam S. Pakaya, MPH
Dr. Lily Sulistyowati, MM
Dr. Bagus Sukaswara, MPH
Dr. Paulus Rudi Margono, MPH
Dr. Tjondro Indarto
Dr. Siti Zainar Rosihan, M.Kes
Sekretaris Ditjen Bina
Kesehatan Masyarakat
Kasubdit Konsumsi Makanan
Direktorat Bina Gizi
Masyarakat
Sekretaris Ditjen Bina
Pelayanan Medik
Direktur Bina Pelayanan Medik
Spesialistik
Kepala Pusat
Penanggulangan Krisis
Kepala Pusat Komunikasi
Publik
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi Papua
Kepala Dinas Kesehatan
Propinsi Papua Barat
GSI Mimika
Kasubdit Bina IKD & UKBM

II. Bidang Sumber Daya Manusia

Ketua : Dra. Nasirah Bahaudin, MM
Sekretaris : Nusli Imansyah, M.Kes
Anggota : Drg. S.R. Mustikowati, M.Kes
Dr. Wandaningsih, MPH
Suharjono, SE, MM
Drs.H. Zulkarnain Kasim, SKM,
MBA
Kepala Pusat Perencanaan
dan pendayagunaan SDM
Kesehatan
Kasubbid Infcrmasi Nakes
Pusrengun SDM Kes
Kepala Biro Kepegawaian
Kepala Biro Umum
Kepala Biro Keuangan dan
Perlengkapan
Seditjen Badan PPSDM



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. Setiawan Soeparan, MPH	Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Dr. Ida Bagus Gautama,	Kepala Pusat Pendidikan & Pelatihan SDM Kesehatan
Dra. Utik Indrawati, M.Kes	Kabid Diklat Teknis dan Fungsional
Drs. H. M. Hasan, M.Kes	Pusdiknakes
Hery Hermawanto, SKM, M.Kes	Pusdiknakes-
Drg. Idawati	Biro Kepegawaian
Syamsul Bahri, SKM, M.Kes	Kabag Program dan Informasi Badan PPSPDM

III. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan Penyakit

Ketua	: Dr. Ratna Rosita Hendarji, MPH	Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
Sekretaris	: Dr. Asik Sunarya	Dit P2ML
Anggota	: Dr. Erna Tresnaningsih, PhD, MOH	Direktur P2B2
	: Dr. Tjandra Yoga Aditama, Sp.P(K)	Direktur P2ML
	: Dr. Andi Muhadir, MPH	Direktur SEPIMKesehatan Matra
	: Dr. T. Marwan Nusri	Sekretaris Direktorat Jenderal P2PL
	: Dr. Sri Hermiyanti, MSc	Direktur Bina Kesehatan Ibu
	: Dr. Ina Hernawati, MPH	Direktur Bina Gizi Masyarakat
	: Dr. Hj. Embry Netty, M.Kes	Kasubdit Bina Pelayanan Medik Dasar di Institusi
Subbid Mobile Clinic	: Dr. Hj. Fatni Sulani DTMH, MSI	Direktur Bina Kesehatan Anak
	: Dr. Lukman Hendro Laksono, MBA	Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Hamil
	: Dr. Kirana Pritasari, MQIH	Kasubdit Bina Kesehatan Bayi
	: Dr. Sigit Prihutomo, MPH	Kasubdit AIDS & PMS
	: Dr. Jane Soepardi, MPH	Kasubdit P2 Tuberculosis
	: Dr. Rita Kusrihastuti, MSc	Kasubdit Malaria
	: Ir. Tatang S. Falah, M.Sc	Kasubdit Bina Kewaspadaan Gizi
	: Sumanto, SKM, MPH	Kasi Standarisasi Bina Upaya Kes DTPK Dit. Bina Keskomp

IV. Bidang Advokasi dan Sosialisasi.

Ketua	: Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, Msi, Sp.F(K)	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretaris	: Bambang Wahyudi, SKM, MM.	Kabag. Hukormas. Ditjen. P2 PL
Anggota	: Arsil Rusli, SH, MH.	Kabag. Peraturan Perundang-undangan.
	: V.A. Binus Manik, SH, MH.	Kabag. Pelayanan Hukum.
	: R. Fresley Hutapea, SH, MARS.	Kabag. Hukormas. Ditjen. Bina Yanmed
	: Ridha V. Hutagalung, SH, MH.	Kabag. Hukormas. Ditjen. Binkesmas
	: Tyaswening K., SH, MM.	Kabag. Hukormas. Ditjen. Bina Yanfar & Alkes
	: Sukamto, SH.	Kabag. Hukormas. Badan PPSPDM



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

V. Bidang Sarana dan Penunjang

Ketua	: Dr. Abdul Rival, MKes.	Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik
Sekretaris	: Dra. Meinarwati, Apt M.Kes	Sekretaris Bina Yanfar & Alkes
Anggota	: Drs. H. Purwadi, Apt, MM, ME	Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
	Ir. Tugiyono, MSc	Kepala Pusat Sarana dan Prasarana,
	Drs. IG Bagus Sarjana, MM	Kabag Umum dan kepegawaian Setditjen Binkesmas.
	H. Ali Bernadus, SKM, M.A	Staf Subdit Kewaspadaan Gizi, Dit Bina Gizi Masyarakat Dit P2ML
	Sudarman	
	Dr. M. Ilhami, SPOG	Kasie Standarisasi Subdit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Dit Bina Kes Ibu.
	Dr. Erna Mulati, MScCMFM	Kasubdit Bina Kes. Balita dan Anak Prasekolah, Dit Bina Kes Anak Dit P2B2
	Dr. Bangkit Hutajulu Charles Tobing, SKM Dr. Witono Santoso, SP.PK	Staf Subdit Malaria Kasubdit Bina Mikrobiologi & Imunologi, Dit. Bina Pelayanan Penunjang Medik

Ketiga : Tugas Tim P2KTP :

Pengarah

- a Menentukan arah, strategi, dan kebijakan pelaksanaan program P2KTP
- b Merumuskan secara teknis arah, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan
- c Melaksanakan pemantauan pengendalian dan penilaian pelaksanaan program

Pelaksana

- a Menyiapkan rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka percepatan pembangunan bidang kesehatan di tanah Papua
- b Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian rencana aksi jangka pendek jangka panjang.
- c Membantu menyusun pedoman pelaksanaan, sosialisasi program, pemantauan dan evaluasi program P2KTP.
- d Melakukan tindak lanjut penyelesaian temuan, masalah dan keluhan di lapangan.
- e Fasilitasi bersama lintas sektoral terkait dalam penyelenggaraan kegiatan program P2KTP.
- f Sebagai penyelenggaraan mediator dalam hal koordinasi penyelenggaraan program P2KTP antara Departemen Kesehatan dan sektor lain.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat

- a Memberikan dan mempersiapkan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan program P2KTP.
- b Menyiapkan dokumen yang diperlukan
- c Mempersiapkan rencana kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program P2KTP
- d Menyiapkan laporan berkala tentang kemajuan kegiatan yang direncanakan

- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim P2KTP bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan, dimana tim dalam kegiatannya didukung oleh Sekretariat.
- Kelima : Tim P2KTP diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan tersebut diatas kepada Menteri Kesehatan secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
- Keenam : Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Tim P2KTP dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan dan sumber lain yang sah.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Desember tahun 2009 dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Dibuat di Jakarta
Pada tanggal : 6 Juni 2008

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K).

Tembusan :

- 1. Inspektur Jenderal Depkes RI
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip